

No. 153 Oktober - November 2018

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**PEMBANGUNAN KTI
BUTUH PETA JALAN RESTORATIF**

**KEPALA SEKOLAH DI DESA NTT
MEMIMPIN DENGAN TELADAN**

**PELAJARAN YANG MENYENANGKAN
DAN BERMAKNA DI NEW ZEALAND**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**
Design & Layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

Oktober - November 2018

No. **153**

- 1** Penentuan Sektor Strategis di Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2020-2024
Oleh **RIO AFIFUDDIN**
- 5** Pembangunan KTI Butuh Peta Jalan Restoratif
Oleh **A. M. SALLATU**
- 9** Kepala Sekolah di Desa NTT Memimpin Dengan Teladan
Oleh **HERA DIANI, DEWI SUSANTI,** dan **SHARON KANTHY**
- 12** Transformasi Administrasi-Peningkatan Inovasi
Transforming Administration - Strengthening Innovation
(TRANSFORMASI)
- 15** Pelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna di New Zealand
Oleh **TIRZA KAILOLA** dan **SERLINIA R. ANAWOLI**
- 19** CAUSINDY
Kontribusi Pemuda Dalam Peningkatan Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia
Oleh **RIO AFIFUDDIN**
- 23** Regulasi yang dikontribusi Program MAMPU-BaKTI (2015-2018)
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 27** MELAYANI Mengunjungi Belu, Serambi Indonesia
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 31** Mereformasi Sekolah dan Komite Sekolah Serta Meningkatkan Tata Kelola Sekolah
Oleh **SUHARTO**
- 33** Kucata'Ki
Inovasi Layanan Pencatatan Kelahiran Online di Rumah Sakit dan Puskesmas
Oleh **HAMSAH SINRING**
- 37** BaKTI Melatih, BaKTI Mendampingi
Oleh **DESY MUTIALIM**
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku
- Foto Cover : **Yusuf Ahmad/Dok. Yayasan BaKTI**





Penentuan Sektor Strategis di Kawasan Timur Indonesia dalam RPJMN 2020-2024

Oleh **RIO AFIFUDDIN**

Bertempat di Atlet Century Park Hotel Jakarta, dilaksanakan pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) XIII. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Kawasan Timur Indonesia dan Yayasan BaKTI, dan didukung oleh *Knowledge Sector Initiative (KSI)* dengan mengangkat tema “Penentuan Sektor Strategis bagi Kawasan Timur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024”.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dilakukan secara rutin untuk mengedepankan isu-isu pembangunan di KTI untuk menjadi perhatian dalam cakupan nasional. Dalam kerangka pijak tersebut, Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI kali ini ditujukan untuk memperluas jangkauan partisipasi KTI dalam proses teknokratik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII dalam pelaksanaannya menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., memberikan paparan kunci. Menurutnya menerapkan perspektif dan paradigma kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, dengan menitikberatkan pada pengurangan potensi dampak bencana adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia yang rawan dengan bencana besar.

Foto : Rulie Ridjal/Dok. Yayasan BaKTI

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI sebagai *keynote speaker*; Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas yang diwakili oleh Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur dan Team Leader Knowledge Sector Initiative (KSI). Selain itu, beberapa perwakilan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan-Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) memaparkan perkembangan dan pentingnya Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan sehari ini juga dirangkaikan dengan makan siang bersama Wakil Duta Besar Australia, Mr. Allaster Cox di tempat pelaksanaan kegiatan.

Acara yang berlangsung mulai pukul 9 pagi itu diawali dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI. Dalam sambutannya, Bapak Yusran Laitupa menyampaikan apresiasinya kepada KSI dan Kepala Bappeda Provinsi atas dukungannya dalam pelaksanaan Forum Kepala Bappeda Provinsi kali ini serta kepada BAPPENAS yang senantiasa memberikan dukungan kepada forum ini.

Dalam sambutannya, Team Leader *Knowledge Sector Initiative*, Petrarca Karetji menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda se-KTI hari ini masih membawa semangat yang sama semenjak 12 tahun lalu, dimana beliau pertama kali berpartisipasi. Pada saat itu, diskusi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI diarahkan pada pentingnya membangun kepercayaan atau keyakinan sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut masih relevan dengan situasi hari ini, dimana *social trust* dalam proses perencanaan dalam pembangunan masih melekat. Selain itu,

kebijakan yang dikembangkan menjadi begitu penting untuk berbasis pada bukti dan pengetahuan yang kuat. Tantangan dalam pembangunan semakin membutuhkan dan mensyaratkan adanya logistik kajian yang kuat di tingkat daerah. Untuk itu, kehadiran dan semakin kuatnya eksistensi Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI hari ini bisa dilihat sebagai peluang pada pentingnya integrasi penelitian dan hasil kajian dalam proses penyusunan kebijakan, demi harapan bersama membangun daerah, KTI dan Indonesia.

Ketua Pokja Forum KTI/Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS memberikan sambutan dan secara resmi membuka pertemuan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI merupakan forum yang berkelanjutan dan eksis hingga saat ini. Forum ini senantiasa aktif mempresentasikan pentingnya penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan, dan kepentingan strategis untuk pembangunan masing-masing provinsi di payung besar Forum KTI.

Lebih lanjut, Ibu Winarni mengatakan bahwa proses teknokratik untuk penyusunan RPJMN periode 2020-2024 telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Proses ini lebih mengandalkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam formulasi perencanaan pembangunan yang secara institusional dilakukan oleh Bappenas, sebagai lembaga negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan dalam bidang perencanaan pembangunan lingkup nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas bertugas menyusun RPJMN dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi Misi Presiden/Wakil Presiden terpilih. Sebagai langkah awal, Bappenas sedang melakukan penyusunan *background study* melalui proses teknokratik sebelum dikembangkan menjadi konsep awal RPJMN. *Background study* ini diharapkan menjadi acuan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden berikutnya untuk dapat digunakan

sebagai pijakan awal dalam pengembangan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Winarni menyampaikan bahwa penting bagi perwakilan dan Kepala Bappeda Provinsi se-KTI yang hadir untuk selain mengidentifikasi capaian dan isu pembangunan di provinsi masing-masing, juga untuk mengedepankan kerangka pembangunan dalam perspektif dan konsepsi kewilayahan Kawasan Timur Indonesia yang akan membawa wawasan dan kepentingan pembangunan nasional dalam kontribusi keseluruhan.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi sektor dan isu-isu strategis, serta masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh masing-masing provinsi KTI; 2) mengungkapkan capaian kinerja pembangunan yang menonjol di masing-masing provinsi KTI; 3) merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan untuk konteks provinsi, pulau besar, maupun regional KTI dalam perspektif lima tahun kedepan; dan 4) memperoleh informasi menyeluruh mengenai proses, cakupan dan arah *background study* RPJMN 2020-2024.

Setelah proses pembukaan, hadir memberikan paparan kunci adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada musibah bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Dalam pidato kunci beliau, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS menyampaikan perkembangan yang terjadi dewasa ini, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kerawanan bencana alam besar. Gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi kerap terjadi, maka perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk 12 provinsi KTI. Penyesuaian tersebut adalah penerapan perspektif dan paradigma kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, dengan menitikberatkan pada pengurangan potensi dampak bencana. Bencana tidak dapat ditunda atau dihalau, namun kita mampu mengurangi jumlah korban manusia, maupun kerusakan fisik.

Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana



Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/ Bappenas, Uke Muhammad Hussein, S.Si, MPP (kiri atas) H.E. Mr. Allaster Cox, wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia dan Petrarca Karetji, Team Leader KSI (kanan atas).

Foto : Rulie Ridjal/Dok. Yayasan BaKTI

dengan mengedepankan sektor kelestarian lingkungan dan mitigasi dampak bencana dapat menjadi salah satu cara dalam penerapan perspektif kebencanaan. Sebagai contoh adalah Kota Maumere di Kabupaten Sikka, NTT yang mana pernah dihantam tsunami pada tahun 1990-an, yang berdampak besar dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Setelah itu, kabupaten tersebut mengembangkan budidaya mangrove di daerah mereka, yang merupakan pertahanan alami menghadapi tsunami yang tentunya tidak bisa dikendalikan kejadiannya. Selain itu, kedepannya perlu dipahami bahwa pemanfaatan ruang perlu dikoneksikan dengan peta potensi kebencanaan dan perencanaan pembangunan. Sinkronisasi ini akan membangun rekomendasi dalam pemetaan potensi dan kerawanan bencana



sehingga kejadian ulang seperti yang terjadi di Palu bisa dihindarkan.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Ir. Bambang Prijambodo, MA dalam pemaparannya pada topik 'Visi Indonesia 2025: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024' mengemukakan bahwa tentunya RPJMN yang akan disusun untuk periode tahun 2020-2024 akan mengacu kepada pembangunan jangka panjang. Perlu ditegaskan bahwa Indonesia mempunyai visi jangka panjang 20 tahun yang saat ini masih berlaku sampai 2025, yaitu Visi Indonesia 2025 yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu dikaji sasaran pokok yang diharapkan dari RPJMN yang akan disusun dalam menyongsong visi 2025. Sasaran tersebut yang telah ditetapkan melalui tiga butir pokok, yaitu percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan penekanan pada tiga hal, yaitu perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM yang berkualitas.

Dalam pemaparan selanjutnya, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN, Uke

Muhammad Hussein, S.Si, MPP mengemukakan tiga hal yang menjadi relevan dalam konteks pembangunan KTI, dimana keunggulan kompetitif wilayah bukan lagi dalam kerangka korporatif, tetapi menyoroti keunggulan komoditas yang dimiliki oleh wilayah. SDM yang berkualitas tentunya akan berkontribusi pada produktifnya suatu wilayah.

Setelah itu, kondisi ini harus didukung oleh struktur ekonomi yang kokoh, yang mana juga perlu dibangun dari pemerintah pusat. Salah satu isu strategis menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas yang berkaitan dengan Kawasan Timur Indonesia dalam hal penyusunan RPJMN adalah isu kewilayahan. Isu tersebut berkaitan dengan ketimpangan antar wilayah, dimana wilayah barat sangat dominan, yang mana infrastruktur seperti jalan dan jembatan lebih baik pembangunannya dibanding KTI. Kemudian, terkait pertumbuhan wilayah, dimana pusat-pusat pertumbuhan perlu semakin dikembangkan di KTI; bukan hanya di Sulawesi saja dimana pusat pertumbuhan seperti Mamminasata dan Manado-Bitung telah berkembang, tetapi dikembangkan hingga Maluku, NTT, dan juga Papua. Imbuan terakhir dari Menteri PPN/ Kepala Bappenas bahwa ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran strategis yang perlu menjadi perhatian bagi para penyusun dan perencana kebijakan di wilayah KTI yang akan berkontribusi pula pada percepatan pembangunan dalam konteks nasional.

Dalam Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI, sesi diskusi dan berbagi kemudian dilaksanakan dengan setiap perwakilan Bappeda provinsi KTI yang hadir memaparkan perkembangan akselerasi pembangunan, isu-isu strategis dan kinerja pembangunan yang menonjol di daerah masing-masing. Selain itu, perwakilan Bappeda provinsi KTI memberikan masukan untuk masalah, isu strategis, dan capaian pembangunan dirangkum dalam Matriks Provinsi yang akan diberikan sebagai input daerah untuk penyusunan *background study* untuk penyusunan Buku III RPJMN.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Pembangunan KTI Butuh Peta Jalan Restoratif

Oleh **A. M. SALLATU**

Pemilihan Presiden 2019 sebentar lagi, setelah itu Keputusan Presiden tentang RPJMN akan ditetapkan. Pemihakan Presiden RI, 2019-2024, melalui Kepresnya itu nanti, betapapun, akan menjadi niscaya bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peran Kepala Negara dan fungsi pemerintahan yang dipimpinnya diharapkan mewujudkan pembaruan baik dalam kebijakan maupun strategi pembangunan yang akan diimplementasikannya.

Setuju atau tidak setuju, posisi relatif KTI nyaris tidak banyak berkembang sejak dari era Orde Baru sampai dengan era Orde Reformasi sekarang ini. Secara



Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan berbagai desa di daerah pelosok di KTI. Kajian tentang pembangunan infrastruktur ternyata tidak banyak memberikan limpahan bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Foto : Abdurrahman/Program KIAM Guru

konseptual pembangunan, apakah memang menutup celah ketimpangan yang demikian lebar selama ini antara KBI dan KTI adalah sesuatu yang utopis? Di masa lalu, dari tahapan Pelita ke Pelita dan dari tahapan RPJMN ke RPJMN yang sudah dalam bilangan beberapa dekade, nampaknya KTI sering kali mendapatkan harapan semu. Kinerja pembangunan nasional yang dihasilkan selama tahapan tersebut tetap meninggalkan KTI jauh tertinggal. Apakah memang menjadi takdir kawasan ini untuk selamanya tertinggal?

Atau memang KTI berikut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan yang dimiliki dan tersedia tidak mampu didorong dan digerakkan untuk

memburu ketertinggalannya? Karena itu, harus dikembalikan lagi bahwa sejatinya ada persoalan mis-manajemen pembangunan di KTI. Artinya, bukan persoalan kebijakan dan strategi dalam pembangunan nasional. Kalau ada benarnya, maka *mis-management* ini juga sepatutnya diangkat ke permukaan permasalahan pembangunan nasional.

Tetapi mungkin patut disadari bahwa wawasan pembangunan KTI seyogyanya tidak didasarkan pada perspektif 'gelas setengah kosong', melainkan sejatinya 'gelas setengah penuh'. Maksudnya, sangat tidak cerdas dan tidak arif bila hanya melihat sisi kurang (setengah kosong) kondisi obyektif yang ada di KTI, sehingga yang selalu dipikirkan adalah bagaimana mengisi yang kosong itu. Menemukan-kenali kekosongan untuk upaya pengisiannya. Justru, akan lebih cerdas dan lebih arif untuk mencermati bagaimana memperbesar kapasitas air yang sudah setengah penuh itu. KTI sejatinya

membutuhkan wawasan kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang bersifat apresiatif.

Bagi KTI, kinerja pembangunan yang dibutuhkan adalah bukan dalam bentuk pengisian (baca: pemberian), apalagi belas kasihan, melainkan kinerja dari serangkaian fasilitasi yang mampu membentuk 'panggung' pembangunan di KTI. Sedemikian rupa sehingga segenap pelaku pembangunan di KTI sendiri mampu melantunkan lagu simfoni pembangunan sesuai dengan kapasitasnya secara bermartabat dan bermakna. Simfoni membutuhkan diregent dan itulah peran dan fungsi pembangunan nasional yang sangat dinantikan dari kehadirannya melalui RPJMN nantinya. Apakah perspektif seperti ini juga sebuah utopis? Atau, hanya indah kedengarannya dan hanya ilusi teoritikal?

Utopisnya pembangunan KTI ternyata, bila kerangka pikirnya didasarkan pada pemikiran arus utama (*main stream*) pembangunan, yang sejatinya berbasis pada apa yang disebut '*warranted growth*'. Mendorong dan merekomendasikan pilihan '*leading sector*' untuk memacu perkembangan, kemudian diderivasikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan. Disitulah titik berat arah investasi pembangunan ingin diletakkan. Kerangka pikir seperti ini, disadari atau tidak, membutuhkan dan menggunakan sejumlah asumsi yang kondisinya justru sangat tidak ideal di KTI. Secara umum, KTI memiliki '*social setting*'-nya sendiri, yang memang berbeda dengan KBI. Itu berarti, KTI membutuhkan apa yang dikenal sebagai '*Local Social Development*', yang sejak di awalnya meletakkan manusia, dan bukannya kapital, sebagai tumpuan pembangunannya. Bahkan mungkin tidak membutuhkan investasi sebesar yang diperlukan pada pemikiran arus utama.

Suka atau tidak suka, terdapat kekeliruan dalam berperspektif pembangunan untuk KTI selama ini. Sialnya, karena wilayah-wilayah di KTI termasuk penentu kebijakannya juga kebanyakan sudah terbius oleh pemikiran arus utama yang dicekikkan selama ini. Ukuran-ukuran kemajuan dan perkembangan yang ada di KBI ataupun yang berlaku secara universal dalam perspektif pemikiran arus utama, yang disodorkan untuk digunakan di KTI. Padahal sejatinya, setidaknya sebagian besar wilayah dan juga manusia di KTI kurang membutuhkan perspektif pembangunan



yang *sophisticated*. Skala dan tingkat kehidupan masyarakat luas di KTI masih dalam makna kesederhanaan, yang lebih alamiah saja. Mereka masih mampu bahagia dengan kesederhanaannya. Pada dasarnya KTI lebih membutuhkan apa yang disebut '*natural growth*', bukan percepatan pertumbuhan berbasis target.

Hampir di seluruh pelosok KTI, sampai detik ini, kita bisa menjumpai ungkapan yang seragam maknanya. Petani, pekebun, nelayan dan peternak sama semua ungkapannya. Bahwa dari hasil kegiatan pokoknya itulah digunakan untuk membeli pakaian, menyekolahkan anak-anak mereka, melengkapi kebutuhan hidup lain yang diperlukannya. Dalam kehidupan mereka, kehidupan komunitas hadir dan tetap harmonis berkembang. Mengukuhkan modal sosial yang telah menjadi warisan nenek moyang mereka. Memang tabungan mereka, walaupun ada kelebihan nilai moneter hasil kegiatan produktifnya, lebih banyak disimpan di bawah kasur untuk motif berjaga-jaga. Karena nyaris sama sekali tidak terpancing untuk memikirkan daya saing. Yang penting mereka meyakini realitas kemandirian dalam keseharian kehidupannya. Mereka tidak butuh atau memimpikan keunggulan melalui persaingan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih membutuhkan kehidupan yang harmonis dengan sesamanya dan dengan lingkungan

Usaha kecil masyarakat di KTI. Jikapun ada kelebihan nilai moneter dari hasil kegiatan produktifnya, lebih banyak disimpan untuk motif berjaga-jaga, karena nyaris sama sekali tidak terpancing untuk memikirkan daya saing.

Foto : Hariandi Hafid/Yayasan BaKTI

kehidupannya. Apakah kehidupan seperti ini menjadi ciri ketertinggalan dan tidak modern?

Ukuran mandiri mereka sangat sederhana, yaitu dengan *self-assessment* setelah terkait dan terhubung dengan manusia lainnya. Kemandirian bagi mereka adalah yang berbasis pada kesadaran diri, termasuk kesadaran bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari komunitasnya. Mungkin perlu terbuka untuk dikemukakan bahwa justru realitas kehidupan kemandirian seperti ini telah dirusak oleh perspektif pemikiran arus utama. Bahkan telah mendorong mereka untuk aktif mengeksploitasi lingkungan hidup disekitarnya, demi untuk memacu tingkat kehidupan ekonomi yang pesat. Agar mereka bisa menabung dan selanjutnya berinvestasi lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Mereka, melalui pemikiran arus utama, terpacu dan dipacu mengekstensifkan kegiatan produktifnya. Tetapi lalu tampil bagaikan orang haus yang hanya meminum air asin. Dengan begitu dahaga kehidupan ekonominya terbentuk bagai tiada akhir. Hasil



Keterkaitan sosial dalam kehidupan masyarakat kecil di pedesaan begitu kental. Mereka tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari komunitasnya, realitas kehidupan kemandirian seperti ini telah dirusak oleh perspektif pemikiran arus utama.

Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

akhirnya, menyeruaklah manusia-manusia KTI yang telah keluar dari akar lingkungan kehidupan dasarnya.

Peta jalan pembangunan KTI benar-benar butuh yang restoratif. Bukan yang didasarkan pada ukuran dan indikator kemajuan yang bersifat modernitas sebagaimana pemikiran arus utama pembangunan yang digunakan selama ini. Mungkin sampai batas tertentu ada juga diperlukan, tetapi jangan dimutlakan. Kajian tentang investasi besar-besaran di KTI yang telah digiatkan selama ini, lebih banyak menghasilkan kantong-kantong kemiskinan. Kajian tentang pembangunan infrastruktur ternyata tidak banyak memberikan limpahan bagi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Alokasi anggaran negara ke KTI terlalu banyak yang menguap dan salah sasaran. Bangunlah KTI untuk manusia dan wilayah KTI sendiri, bukan untuk dipasarkan pada perekonomian global.

Tantangan pokok dan utama dalam pembangunan KTI saat ini dan ke depan adalah pembangunan pemerintahan pada setiap

wilayah di kawasan ini. Inilah sejatinya yang patut menjadi lokomotif pembangunan KTI. Memang dibutuhkan gerbong panjang yang perlu dihela: pendidikan yang memanusiakan manusia-manusia KTI, kesehatan yang mampu membuat manusia-manusia KTI semakin produktif secara fisik, infrastruktur yang memfasilitasi kegiatan produktif masyarakat KTI, investasi yang mampu memperluas peluang dan kesempatan masyarakat KTI untuk tetap dalam kemandirian awalnya, teknologi yang mampu tetap mengakrabkan hubungan kemanusiaan masyarakat KTI.

RPJMN yang akan datang seyogyanya benar-benar mampu menjadi payung besar pembangunan bangsa, menciptakan panggung agar masyarakat KTI juga bisa turut memberi kontribusi sesuai dengan kapasitas lokalnya. RPJMN sepatutnya mampu menjadi kerangka delegasi kewenangan bagi semua daerah, termasuk KTI, agar mampu mengembangkan kapasitas keotonomian yang memang sudah ada selama ini, bukan RPJMN yang akan mencabut masyarakat KTI dari akar kehidupannya yang hakiki. Itulah makna peta jalan pembangunan restoratif yang dibutuhkan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com



Kepala Sekolah di Desa NTT Memimpin Dengan Teladan

Oleh **Hera Diani, Dewi Susanti,**
dan **Sharon Kanthy**

Ada perumpamaan ‘Pemimpin yang baik harus memberikan contoh yang baik’, dan inilah yang selalu dilakukan Janur Damianus sebagai Kepala Sekolah SDN Mboeng di Desa Kaju Wangi, salah satu desa sangat tertinggal di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.

Tiap pagi, dengan mengendarai motornya melewati jalanan berbatu di kawasan pegunungan selama 30 menit, Janur akan menjadi orang pertama yang tiba di sekolah. Pria bertubuh tinggi kurus ini tidak perlu

meninggikan suaranya ketika berbicara. Pembawaannya yang tenang dan sabar justru membuatnya menjadi sosok yang disegani.

“Bapak Kepala Sekolah sangat baik dan kebabakan, namun juga sangat disiplin, membuat kita malu kalau tidak mengikuti contoh yang diberikan. Kalau kami berbuat salah, ia tidak akan marah-marah, tapi memberikan nasihat yang masuk akal. Ia adalah orang yang sangat terbuka dan tidak malu mengakui kesalahan,” ujar Wali untuk murid Kelas IV Elfrida Iman.



Janur Damianus, 53 tahun, Kepala Sekolah SDN Mboeng di Desa Kaju Wangi di ruang kelasnya yang amat sederhana.

Foto : Fauzan Ijazah/KIAT Guru

ketika musim hujan tiba, bangunan sekolah yang terbuat dari bambu akan kemasukan air dan sekolah menjadi banjir sehingga murid-murid tidak dapat bersekolah selama beberapa hari.

Namun Janur secara konsisten selalu tiba lebih awal dan jerih payahnya pun terbayar: para guru mulai hadir di sekolah tepat waktu. “Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri,” ujar Janur yang berasal dari Desa Golosari di kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Sambirampas.

Ketika SDN Mboeng terpilih sebagai salah satu sekolah rintisan program KIAT Guru, Janur sangat gembira karena ia merasa banyak hal yang perlu ditingkatkan, tetapi sekolah dan masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup. Program rintisan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari World Bank dan pembiayaan dari Pemerintah Australia, program rintisan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan di daerah terpencil dengan melibatkan masyarakat dalam menilai kehadiran dan kualitas layanan guru.

Fasilitator KIAT Guru Angga Yoga S. mengatakan kepala sekolah menjadi sosok penting karena ia merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat.

“Kepala sekolah membantu kami untuk mendapatkan dukungan pemerintah desa dalam menjalankan program ini, dan ia mendukung penuh Kelompok Pengguna Layanan (KPL), yang terdiri dari orang tua murid dan tokoh masyarakat, meski ia tahu bahwa KPL akan memantau dan mengevaluasi kinerjanya,” kata Angga.

Ketika muncul tuntutan dari guru untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, Janur menyelesaikan masalah tersebut secara damai dengan memberikan pengertian kepada guru bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat, dan yang

Setelah mengajar selama 31 tahun, Janur, 53 tahun, dipindahtugaskan ke SDN Mboeng pada 2015. Ia masih ingat bagaimana dulu ia tiba tiap pagi pukul 07.15 WITA hanya untuk mendapati kompleks sekolah yang hampir kosong. Banyak guru yang baru tiba di sekolah setelah pukul 07.30 WITA, waktu seharusnya kelas sudah dimulai.

Janur mengatakan bahwa ia tidak marah karena ia paham tantangan yang harus dihadapi guru dan murid, yang harus melewati jalanan yang berat untuk mencapai sekolah. Belum lagi



Foto: Fauzan Ijazah/KIAT Guru

terpenting adalah bahwa murid harus mendapatkan pendidikan yang terbaik.

Angga mengatakan Janur sangat terbuka dengan masukan, bahkan dari seseorang yang jauh lebih muda sekalipun.

“Saya pernah bercerita kepadanya tentang kepala sekolah di Yogyakarta yang suka berkeliling sekolah untuk melihat sendiri kondisi murid-murid. Ia menganggap itu ide yang sangat baik dan ia mulai melakukan hal yang sama,” kata Angga.

Janur memprakarsai perpustakaan sekolah ketika muncul permintaan dari para murid. Ia mengatakan bahwa ia meminta sumbangan buku dari berbagai sekolah, anggota keluarga hingga kenalannya di Jakarta. Hasilnya, SDN Mboeng tahun ini menerima donasi ratusan buku dari masyarakat.

Janur juga mewajibkan semua orang di sekolah untuk menggunakan Bahasa Indonesia dari Senin hingga Kamis. Inisiatif ini diberlakukan setelah melihat hasil temuan awal (*baseline survey*) KIAT Guru yang menunjukkan banyak murid yang belum dapat berbahasa

Indonesia dengan baik karena kebanyakan masih menggunakan bahasa daerah.

“KIAT Guru adalah program yang sangat baik. Kami sebagai guru belajar banyak dari hal ini. Kami menerima pelajaran yang amat berharga, yaitu tentang disiplin dan kehadiran,” katanya.

Ia berharap program rintisan ini akan diimplementasikan di tiap sekolah, atau setidaknya di sekolah anak perempuannya yang berumur delapan tahun yang berada di seberang rumahnya. Janur mengatakan ia tidak menyekolahkan anaknya di SDN Mboeng karena lokasinya yang terlalu jauh dan jalur menuju sekolah yang berat akan sulit dilalui ketika musim hujan. Meski demikian, ia prihatin dengan kondisi absensi kehadiran guru dan kurangnya layanan pendidikan yang diberikan di sekolah anaknya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini telah dimuat pada laman:

<https://www.localsolutionstopoverty.org/id/project/kiat-guru-kinerja-dan-akuntabilitas-guru.html>

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KIAT Guru, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Transformasi Administrasi- Peningkatan Inovasi

Transforming Administration – Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)

Tantangan

Kemampuan kinerja yang rendah dari administrasi publik Indonesia menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di negeri ini. Produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya rendah: tidak semua pegawai negeri sipil terlatih dengan baik, bertindak secara profesional, dan bekerja secara transparan. Secara keseluruhan, proses-proses birokrasi tidak mengarah menuju kinerja. Struktur pemerintah dan birokrasi ditandai oleh kompetensi-kompetensi yang tidak jelas, sikap kompetitif, dan perebutan kekuasaan politik sehingga menghasilkan sejumlah besar ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang saling bertentangan.

Pemerintah Indonesia berupaya menerapkan pendekatan menyeluruh dalam reformasi birokrasi yang mengarah pada pengawasan efektifitas biaya, mendorong orientasi pada kinerja, dan memastikan pengembangan sumber daya manusia yang tepat di bidang administrasi publik.

Tujuan

Administrasi publik akan berkinerja lebih efektif dan efisien dengan menitikberatkan pada

akuntabilitas serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pendekatan

Program TRANSFORMASI mengupayakan sebuah pendekatan yang berbasis pada pengelolaan pengetahuan, mendukung pelaku-pelaku utama dalam reformasi birokrasi untuk menyusun proposal bersama, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang berhasil. Program ini bekerja sama dengan sejumlah besar pelaku di tingkat internasional, nasional, dan daerah.

TRANSFORMASI menguatkan kompetensi dalam perencanaan dan pengawasan dari para lembaga mitra dan beberapa pemerintah daerah terpilih, dengan tujuan untuk meningkatkan koherensi keseluruhan dari reformasi birokrasi serta untuk mempercepat pelaksanaannya. Satu hal yang penting adalah mengenai pembagian kompetensi di bidang pengarah dan pengawasan di antara lembaga-lembaga yang terkait. TRANSFORMASI mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pengambil keputusan politik utama untuk mengemban perannya tersebut.



(Kiri) Pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh umpan balik setelah pembangunan purwarupa untuk optimasi proses dalam penerbitan KTP Indonesia (Kanan) Diskusi tentang penerapan reformasi birokrasi dengan anggota masyarakat sipil di Banyuwangi. Foto : Dok. GIZ

Reformasi ASN di bidang remunerasi, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk mencapai orientasi yang lebih besar pada kinerja dan untuk meningkatkan pelayanan. Dalam konteks ini, TRANSFORMASI mengupayakan kerja sama antar lembaga yang lebih erat, sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ASN yang baru.

Mengingat bahwa reformasi birokrasi membutuhkan fleksibilitas finansial, TRANSFORMASI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat dampak fiskal dari reformasi birokrasi menjadi transparan bagi para pelaku utama. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik di antara berbagai tujuan yang ada, misalnya menjaga fleksibilitas keuangan di satu pihak, dan di lain pihak juga memastikan pemberian remunerasi yang pantas kepada pegawai.

Di Banyuwangi, Serdang Bedagai dan Makassar, TRANSFORMASI mendukung pelibatan organisasi-organisasi non-

pemerintah/masyarakat sipil (OMS) dalam reformasi pemerintahan.

Di Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan, para pemangku kepentingan di tingkat daerah menggunakan platform inovasi untuk berbagi praktik-praktik baik dalam penyediaan pelayanan publik. Instrumen-instrumen baru diperkenalkan untuk saling bertukar pengetahuan dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik dengan partisipasi kuat dari masyarakat.

Hasil yang dicapai

Hasil-hasil (sementara) di bawah ini telah dicapai dengan kerja sama yang erat dengan institusi-institusi mitra.

Terkait perencanaan dan pemantauan reformasi birokrasi:

- Konsep untuk memonitor target-target tahunan reformasi birokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersedia.
- Metode-metode baru untuk evaluasi



independen implementasi reformasi birokrasi di tingkat kabupaten/kota tersedia; menggunakan kombinasi wawancara, *crowdsourcing*, diskusi grup terfokus, dan *mystery shopping*.

Terkait manajemen sumber daya manusia dalam ASN:

- Model kompetensi yang dibakukan untuk ASN di posisi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) tersedia
- *Talent Pool* ASN di posisi JPT telah dibangun
- Pelatihan kepemimpinan ASN meningkat
- Standar manajemen kinerja ASN telah terspesifikasi

Terkait keuangan publik:

- Model untuk mereformasi sistem remunerasi aparatur sipil negara telah dikembangkan
- Sistem pelatihan internal untuk staf di tingkat sub-nasional tentang manajemen keuangan daerah telah direformasi (dengan dukungan dari *Particip GmbH*)

Terkait reformasi birokrasi berorientasi warga:

- Kesepakatan antara pemerintah daerah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan terkait reformasi birokrasi. Perbaikan-perbaikan konkret telah dicapai dalam area-area tertentu (misalnya pelayanan penerbitan akta lahir yang lebih efisien)

Terkait inovasi pelayanan publik:

- Jaringan inovasi pelayanan publik yang melibatkan Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Komisi Pelayanan Publik, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan media telah dibangun untuk mengembangkan pembelajaran bersama mengenai praktik-praktik baik yang sudah ada, dan mengakselerasi pengembangan pelayanan-pelayanan publik garis depan yang inovatif.
- Inovasi-inovasi Indonesia diikutsertakan di dalam Observatorium Inovasi Pelayanan Publik dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD-OPSI).

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program TRANSFORMASI dapat menghubungi Ibu Fadhiah Machmud melalui email fadhiah07@yahoo.com



Foto: Laila Harre/Program INSPIRASI

Pelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna di New Zealand

Oleh **TIRZA KAILOLA**
dan **SERLINIA R. ANAWOLI**
Peserta Program INSPIRASI 2018

Kesempatan untuk belajar di suatu negara dengan budaya masyarakat dan budaya belajar yang berbeda tentu saja menjadi pengalaman berkesan dan berharga bagi setiap orang. Itulah yang kami rasakan sebagai peserta program INSPIRASI. Dua minggu masa orientasi untuk pengenalan dan adaptasi dengan lingkungan New Zealand telah selesai.

Memasuki minggu ketiga di bulan Juli, kami memulai kegiatan pelatihan Bahasa Inggris. Kursus intensif selama 3 bulan hingga akhir September ini bekerja sama dengan International House di Auckland University of Technology (AUT). Kelas ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris kami dalam menulis,

membaca maupun berkomunikasi. Dikemas dalam kelas internasional, kami dapat memperkaya kemampuan dan keterampilan melalui interaksi dengan siswa-siswi dari berbagai negara. Kami diajar oleh guru-guru yang berkualitas dan penutur asli Bahasa Inggris.

Selain memperdalam kemampuan bahasa Inggris masing-masing peserta, kelas ini juga memperdalam pengenalan budaya dari negara lain dan mengembangkan pemahaman budaya. Kami bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat dan mahasiswa dari berbagai suku bangsa seperti Thailand, China, Korea, Perancis, Arab Saudi dan Jordania membuat kami lebih toleran untuk menerima budaya lain yang berbeda. Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menambah relasi dan pengalaman berinteraksi dan mengenal budaya lain di dunia.

Kami juga mendapat kesempatan mengenal lebih dekat kebudayaan New Zealand melalui kelas Pengantar Budaya. Berbagai informasi mulai dari sejarah negara New Zealand, penduduk asli dan kebudayaannya, sampai perkembangan modernisasi disajikan dalam kelas ini. Metode penyajian materi yang sangat bervariasi melalui diskusi aktif, kunjungan lapangan dan eksplorasi melalui video dan film membuat pembelajaran ini menjadi menarik. Tak lupa kami diberikan kesempatan mencicipi makanan dan minuman khas dari New Zealand dan mengikuti acara perayaan tahun baru suku Maori (Matariki).

Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam program pembangunan berkelanjutan, kami pun dilatih dalam kelas kepemimpinan dan penulisan akademik. Kelas ini mengasah keterampilan para peserta dalam kepemimpinan, berpikir kritis dan manajemen proyek. Melalui kelas ini setiap peserta dipersiapkan untuk membuat proyek berkelanjutan yang akan diaplikasikan di organisasi masing-masing.

Setiap peserta pun difasilitasi dengan seorang mentor yang akan membantu dalam merencanakan proyeknya. Salah satunya, Serlinia R. Anawoli dari Koalisi Perempuan Indonesia NTT, yang mendapat mentor, Carol Beaumont, seorang perempuan hebat, penuh

inspirasi, aktif dalam Partai Buruh, Kepala Organisasi Perawat di New Zealand, juga Presiden National Council of Women New Zealand – Branch Auckland.

“Senang sekali diberikan kesempatan berbagi cerita pengalaman pergerakan perempuan NTT dalam pertemuan rutin National Council of Women New Zealand – Branch Auckland”, ungkap Serlinia bangga.

Tidak kalah menariknya, peserta lain juga mengunjungi beberapa lokasi untuk melihat pengembangan masyarakat dan usaha sosial bersama mentor. Bahkan dilibatkan dalam kegiatan komunitas mentor dan keluarga angkat. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berjejaring. Misalnya, Citra Al Rasyid yang ikut dalam Konferensi Perempuan PSA telah membawanya bertemu konsultan perjalanan Indonesia-New Zealand. Citra yang kebetulan fokus mengeksplorasi ekowisata sebagai alternatif kehidupan untuk perburuan ilegal, penambangan dan penambangan di Gorontalo sedang mencari peluang bagi daerahnya.

Bagi Andi Arifayani, peserta INSPIRASI dari Yayasan Lemina Makassar, menuturkan pengalaman yang berbeda. Tinggal dengan keluarga asuh yang memiliki anak kecil, memberikan *exposure* baru tentang interaksi anak dan orangtua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua memberikan kebebasan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya dan membantu anak dalam setiap proses pertumbuhan. Anak didik dalam lingkungan yang demokratis dan menghargai hak-hak anak. Bahkan dalam percakapan sehari-hari anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah sebuah hal yang baru untuk dipelajari sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pelayanannya untuk memahami hak-hak anak dalam konteks budaya yang berbeda.

Dalam kesempatan yang lain, kegiatan ini pun membuka ruang memperkenalkan budaya Indonesia melalui kulinernya. Rezky Pratiwi mencoba memperkenalkan ragam makan Indonesia kepada keluarga asuh, seperti Soto Ayam, kari ayam, sate dan pisang goreng. Rangkaian rasa yang unik dan berbeda



memberikan mereka sebuah eksplorasi baru tentang makan Indonesia. Hal yang menarik adalah orang New Zealand tidak begitu terbiasa dengan menu pisang goreng coklat keju. Keluarga asuhnya tertarik untuk mencoba pisang goreng meskipun kurang yakin terlihat di wajahnya.

Selain itu, di kelas Bahasa Inggris, kami pun menginisiasi pengenalan budaya melalui lagu, tarian, baju daerah dan sharing makanan Indonesia dengan teman-teman dan guru dari negara lain. Kami menyanyikan beberapa lagu daerah dari Indonesia dengan menggunakan baju daerah kami masing-masing. Beberapa orang menjadi terkesan dan penasaran dengan Indonesia ketika menyaksikan bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan suku yang berbeda. Hal ini memberikan pengetahuan yang baru buat beberapa orang tentang realita Indonesia yang tidak hanya tentang Bali.

Bagi Fauzan Ade Azizi, IT manager *social enterprise* bernama Tenoon, kesempatan belajar di New Zealand adalah kesempatan seumur

hidup. Meski sebelumnya telah merasakan hidup di Australia sebagai pemegang working holiday visa, pengalaman sebagai peserta Indonesia Young Leaders Programme (IYLP) membuat pria yang sering disapa Fauzan ini belajar banyak hal baru salah satunya berkaitan dengan kebijakan bagi difabel. Di Auckland, sangat mudah menemukan orang dengan kursi roda berada di keramaian jalan Queen Street. Fasilitas yang tersedia juga ramah bagi difabel.

Lain halnya dengan Rosa Depanda, perempuan asal Nagekeo yang belajar tentang *Water and Sanitation Hygiene* (WASH). Melalui berbagai program yang disediakan oleh penyelenggara beasiswa (UnionAID), Rosa dan kawan-kawan difasilitasi dalam pembelajaran tentang *Waste Management* serta pembuatan dan pemanfaatan kompos. Dalam sesi yang dilaksanakan di Pulau Waiheke, kami belajar praktik baik pengolahan sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang bisa meningkatkan pendapatan komunitas.

Foto: Laila Harre/Program INSPIRASI





Foto: Laila Harre/Program INSPIRASI

Pengalaman seru lainnya dirasakan oleh Tirsana Kailola melalui sistem pendidikan PAUD di New Zealand. Pendidikan yang berfokus pada pertumbuhan dan kesejateraan anak menjadikan pendidikan PAUD di negara ini sangat ramah kepada anak. Sistem pembelajaran yang dilakukan melalui *free-playing* dirancang untuk membuat anak belajar tanpa dipaksa. Praktik ini menghasilkan anak-anak yang mandiri dan kreatif. Sungguh sebuah sistem yang baik yang bisa kita kembangkan di Indonesia.

Berhubungan dengan makan lokal orang Maori, Ester Elisabeth Umbu Tara memperdalam pengetahuannya tentang kesejateraan pangan melalui pemanfaatan makan lokal. Hal ini membantu Ester dalam memperkenalkan dan mempromosikan makanan lokal di NTT.

Para peserta program juga ikut dalam diskusi bersama peneliti-peneliti perempuan di Universitas Auckland tentang 'Putting Women

on the Pathway to Political Representation', dan berpartisipasi dalam perayaan hari *Indigenous People* bersama *Pacific Women Watch*. Selain itu ikut berpartisipasi dalam Konferensi Perempuan International bertajuk '*Strenght in Diversity*' dengan pembicara utama Ibu Helen Clark, Mantan Perdana Menteri perempuan pertama New Zealand.

Tidak hanya belajar di kelas, berdiskusi, dan ikut dalam berbagai kegiatan, kami diberikan juga kesempatan berpetualang dan mengeksplorasi keindahan alam New Zealand. Di akhir minggu, kami mengunjungi berbagai tempat wisata yang menakjubkan dan menawarkan banyak pilihan wisata yang bisa dicoba, seperti wisata alam, sejarah dan budaya. Sungguh pengalaman belajar yang sarat dengan makna dan menyenangkan!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program INSPIRASI, dapat menghubungi info@bakti.or.id





CONFERENCE OF AUSTRALIAN AND INDONESIAN YOUTH

CAUSINDY

Kontribusi Pemuda Dalam Peningkatan Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia

Oleh **RIO AFIFUDDIN**

Hubungan dua negara Indonesia dan Australia telah berlangsung sejak abad ke-18, bahkan sebelum ditemukannya benua Australia oleh pelaut dari Eropa. Kontak dagang telah dikembangkan antara masyarakat indigenous di daratan Australia bagian Utara dengan pelaut Makassar, terutama pada komoditas teripang, yaitu sejenis timun laut yang pada kala itu dianggap sebagai salah satu komoditas unggulan. Setelah pendudukan

imigran dari Eropa menjadi sebuah negara persemakmuran yang berdaulat, hubungan Australia dan Indonesia semakin kuat, dan secara resmi dikukuhkan setelah Australia mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Hari ini, hubungan kedua negara semakin tumbuh dan kuat, meliputi kerjasama di berbagai sektor, mulai dari keamanan, perdagangan, budaya, pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.



Foto-foto: CAUSINDY

Abad ke-21 membuka serangkaian peluang dan tantangan bagi hubungan bilateral negara Indonesia dan Australia. Kedua negara akan mengembangkan dan menerapkan pendekatan baru yang lebih strategis untuk merangkul peluang dan menghadapi tantangan abad modern hari ini. Kaum pemuda di kedua negara, sebagai contoh, berkat semakin luas dan cepatnya perkembangan dan pertukaran informasi, maka semakin ingin mengetahui dan ingin terlibat dalam prospek dan peluang dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara kedepannya. Banyak inisiatif semakin diretas oleh kedua negara agar generasi baru tidak hanya lebih banyak mengetahui, tetapi juga secara aktif memberikan kontribusi pada diskusi bilateral dan menyampaikan ide-ide baru untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

CAUSINDY atau Konferensi Pemuda Australia-Indonesia adalah organisasi pemuda yang didirikan dengan tujuan menyediakan *platform* bagi pemimpin muda dari Australia dan Indonesia untuk menguatkan potensi kedepan dari hubungan bilateral kedua negara. CAUSINDY digerakkan oleh sekelompok relawan pemuda di kedua negara untuk menggelar konferensi tahunan yang diadakan secara

bergantian di kota yang berbeda di Australia dan Indonesia setiap tahunnya. *Event* konferensi ini adalah acara utama dari CAUSINDY, yang mana merupakan sebuah program empat hari yang menyatukan 30 pemimpin muda kedua negara. Para peserta tersebut, yang disebut sebagai delegasi, dipilih berdasarkan seleksi oleh tim CAUSINDY, yang mana merupakan pemimpin dan profesional muda dari berbagai bidang; ekonomi dan bisnis, pejabat pemerintah, akademisi, LSM, dan perusahaan sosial.

CAUSINDY tahun ini adalah *event* konferensi tahun keenam, yang digelar di Makassar, sebuah kota yang merupakan pusat pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai gerbang depan dari Kawasan Timur Indonesia. CAUSINDY tahun ini mengambil tema bertajuk "*Connected by Sea*" atau Terhubung Oleh Lautan. Dengan tema tersebut, CAUSINDY bermaksud untuk menyoroti dan mengeksplorasi pendekatan inovatif dan kreatif untuk mempertajam hubungan bilateral kedua negara dalam lingkup maritim. Berkaitan dengan tersebut, Makassar menjadi tempat pelaksanaan yang sesuai, sebagai salah satu kota pelabuhan di Indonesia yang semakin berkembang. Konferensi ini digelar pada tanggal 5-8 September 2018 di Hotel Melia, Makassar.



Foto-foto: CAUSINDY

Dalam durasi selama empat hari tersebut, CAUSINDY soroti tiga garis besar utama;

1 **Diskusi Panel**, yaitu diskusi yang digelar dengan mengundang narasumber utama dari empat sektor utama yang disoroti oleh CAUSINDY tahun ini. Keempat sektor tersebut adalah Politik, Bisnis dan Perdagangan, Keamanan Regional, dan Pelestarian Kawasan Pesisir dan Lingkungan. Dalam diskusi panel ini, 30 delegasi diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber yang merupakan *experts* dan *leaders* di keempat sektor tersebut.

Diskusi Panel Sektor Politik

Panel politik mengulas perkembangan politik domestik Australia dan Indonesia yang memberikan pengaruh kepada kebijakan luar negeri kedua negara dan hubungan bilateral kedua negara. Melihat perkembangan pada pemilihan umum yang akan digelar setahun kedepan, panel ini mengeksplorasi arah dari hubungan politik kedua negara kedepannya. Melalui diskusi dengan ahli politik dan kebijakan, Ima Abdulrahim, Direktur Eksekutif The Habibie Centre, dan Ian Wilson, akademisi dan peneliti dari Murdoch University dan dimoderatori oleh Uni Lubis, jurnalis senior dan *Editor-in-Chief*

IDN Times, para delegasi didorong untuk mengajukan pertanyaan mendalam yang tidak lumrah ditanyakan dalam sesi diskusi politik kebanyakan.

Diskusi Panel Bisnis dan Perdagangan

CAUSINDY tahun ini diselenggarakan pada masa IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) berproses untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Scott Morrison. Untuk itu, Panel Bisnis dan Dagang tahun ini menyoroti dampak positif kedepan dari IA-CEPA bagi peningkatan kerjasama ekonomi dan dagang kedua negara. Panel sektor ini dibawakan oleh Julian Smith dari PwC Indonesia Advisory, Vonnie Opier dari ERP Oracle dari *Cloud Project* dibawah Kalla Group, dan Noke Kiroyan, *Chairman* dan *Chief Consultant* Kiroyan Partners.

Diskusi Panel Keamanan Regional

Dalam sesi yang menggabungkan wawasan akademis dari para ahli dan peluang berkolaborasi, Sesi Keamanan Regional mengulas tantangan keamanan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia, serta peluang bagi kedua negara dalam menanggapi tantangan

tersebut. Pertanyaan utama pada sesi ini, yang mana dibawakan oleh Dr. Greg Rahmond dari *Strategic and Defence Studies Centre*, Australian National University; Prof. Philips Vermonte, Eksekutif Direktur *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan dipandu oleh Natalie Sambi, *Research Fellow* Perth USAsia Centre adalah mengapa sektor maritim sangat penting bagi keamanan nasional kedua negara, dan dalam hal apa ancaman non-tradisional mempengaruhi keamanan Australia dan Indonesia.

Diskusi Panel Pelestarian Kawasan Pesisir dan Lingkungan

Sebagai tema tahun ini, maka sesi panel ini merupakan salah satu sektor terpenting yang disoroti oleh CAUSINDY. Mayoritas populasi kedua negara bermukim di sepanjang wilayah pesisir, berfungsi sebagai tujuan wisata dan merupakan sumber penting ekonomi dan sosial bagi jutaan orang. Namun demikian, Kawasan pesisir juga merupakan Kawasan yang paling rentan dalam pencemaran lingkungan. Ancaman perubahan iklim, kerusakan ekosistem laut, dan maraknya penangkapan ikan berlebihan dan metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berkontribusi pada ancaman pada ketahanan pangan jutaan rakyat. Panel Lingkungan, yang dibawakan oleh Prof. Jamaluddin Jompa dari Universitas Hasanuddin, Rili Djohani, Direktur Eksekutif *Coral Triangle Centre* (CTC), dan Simon Baldwin dari SecondMuse Indonesia, mengeksplorasi ancaman lingkungan yang dihadapi kedua negara saat ini, serta peluang untuk menanggapi ancaman tersebut melalui kolaborasi yang aplikatif dan berkelanjutan.

② **CAUSINDY Reviews** adalah serangkaian sesi yang ditujukan bagi para delegasi untuk meretas ide, pikiran, analisis dan pengalaman mereka ke dalam aksi nyata. Dengan berkolaborasi menghasilkan proyek konkret yang dapat menguatkan prospek kedepan hubungan kedua negara. 31 delegasi dibagi ke dalam lima kelompok dan dipandu oleh mentor yang berpengalaman, mulai dari sesi brainstorming hingga finalisasi dari proyek mereka. Pada sesi terakhir di hari terakhir rangkaian konferensi, setiap kelompok akan mempresentasikan proyek

mereka ke segenap delegasi, tim panitia CAUSINDY dan panel dari kelima mentor, yang akan memberikan feedback mereka serta menanyakan pertanyaan lanjutan mengenai proyek masing-masing.

③ **Social and Networking Events** memberikan peluang besar bagi para delegasi untuk saling berkenalan dan berinteraksi, dan membangun diskusi informal dengan team CAUSINDY, pembicara dan narasumber diskusi panel, mentor, dan mitra lainnya. Tahun ini, event sosial dan berjejaring diselenggarakan dengan melakukan tur ke Benteng Rotterdam dan Pantai Losari, sebuah sesi makan malam dengan Walikota Makassar dan penyampaian *keynote speech* oleh Bernadus Djonoputro dari Deloitte Indonesia, sesi makan malam dengan Konsul Jenderal Australia di Makassar, dan *Gala Dinner* pada malam terakhir konferensi. Selain itu, CAUSINDY tahun ini juga menggelar program EFL atau *Engaging Future Leaders*, yang mengundang partisipasi siswa-siswi dari berbagai sekolah di Makassar untuk melakukan program pertukaran bahasa selama sehari bersama 31 delegasi CAUSINDY. EFL tahun ini meningkatkan kepercayaan diri para siswa-siswi sekolah di Makassar untuk berbahasa Inggris, serta dengan ceria mendorong kreativitas, keingintahuan, dan pengetahuan mereka mengenai Australia, serta membangun pertukaran budaya antara warga Indonesia dan Australia.

CAUSINDY berakhir pada hari Sabtu, 8 September 2018 dengan makan siang terakhir. Empat hari penyelenggaraan konferensi ini telah meninggalkan kesan yang besar bagi seluruh pihak yang berpartisipasi: team CAUSINDY, 31 delegasi Indonesia dan Australia untuk konferensi tahun ini, kelima mentor, narasumber diskusi panel, dan para mitra. Sebagai penutup, CAUSINDY menjadi sebuah podium besar bagi pemimpin muda kedua negara untuk berbagi ide-ide inovatif, mengeksplorasi kreativitas dan analisis untuk membangun, berkontribusi, dan memastikan keberlanjutan hubungan bilateral Australia dan Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah salah satu dari 15 anggota delegasi Indonesia di CAUSINDY 2018. Lebih lanjut, silahkan kunjungi:

<http://2018.causindy.org>

Regulasi yang dikontribusi Program MAMPU-BaKTI (2015-2018)

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Yayasan BaKTI pada fase pertama (2013-2016) fokus pada mendorong perubahan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin (pro poor) dan responsif gender. Pada fase kedua (2017-2020), Yayasan BaKTI fokus meningkatkan akses kepada layanan dan program dasar pemerintah untuk perempuan miskin di wilayah program.

Perubahan kebijakan, baik dalam bentuk regulasi maupun program, penting untuk memastikan bahwa perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya dihitung dan diikuti dalam setiap pembentukan kebijakan dan implementasinya.

Tidak mudah mendorong perubahan kebijakan. Pasalnya pihak-pihak yang dapat mengubah kebijakan tidak selalu mempunyai perspektif yang memihak pada perempuan dan kelompok marjinal. Advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan dalam bentuk regulasi dianggap sebagai sebuah keberhasilan, walaupun lahirnya regulasi barulah satu tahap. Implementasi regulasi adalah tahap berikutnya.

Pentingnya Regulasi

Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) penting karena merupakan instrumen

hukum tertinggi di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah. Di antara hal-hal yang perlu dijabarkan di tingkat daerah antara lain adalah perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, kaum disabilitas, dan hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah.

Regulasi yang berhubungan hak-hak dan perlindungan perempuan di tingkat daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap perempuan. Adanya regulasi memudahkan pemerintah daerah untuk membuat program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan.

Implementasi Regulasi

Regulasi dalam bentuk Perda yang telah disahkan harus dibuatkan aturan implementasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Aturan implementasi tersebut mengatur dan menjelaskan secara teknis tugas dan tanggungjawab tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat dalam implementasi Perda.

Jika diperlukan dapat dibuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mempermudah setiap SKPD menyusun program dan penganggaran setiap tahunnya, dengan mengambil dari dokumen RAD. Jika perda tersebut mengatur lembaga layanan dan sejenisnya, maka harus disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya untuk memudahkan penyediaan dan pengoperasian lembaga layanan.

Untuk hal-hal yang sangat teknis dan terbatas pada lingkup SKPD tertentu, maka diperlukan aturan setingkat Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Kepala Dinas. Hal ini untuk mempercepat lahirnya regulasi untuk implementasi suatu kebijakan.

Sejak 2015, mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU yang mengadvokasi kebijakan berfokus pada tiga hal. Pertama, mendorong lahirnya kebijakan yang responsif gender dan pro poor dalam bentuk Perda dan Peraturan Bupati/Walikota. Kedua, mendorong implementasi perda tersebut dengan membuat perangkat-perangkat teknisnya dan memastikan penganggarannya di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada SKPD-SKPD terkait. Ketiga, memonitoring, evaluasi, dan mendokumentasikan pembelajaran dan praktek terbaik untuk replikasi.

Advokasi untuk melahirkan kebijakan yang responsif gender dan *pro poor* tidak harus melahirkan dan membuat Perda baru, jika di daerah telah tersedia berbagai Perda dimaksud. Yang perlu dilakukan adalah mendorong dan menyediakan perangkat untuk implementasi berbagai Perda yang sudah ada.

Regulasi Tingkat Desa

Desa menurut Undang-Undang Desa (UU No. 6/2014) mempunyai sejumlah kewenangan, termasuk pembentukan Peraturan Desa (Perdes). Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes dapat mengatur berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Dengan adanya Perdes, maka pemerintah mempunyai instrumen dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Perdes juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa.

Program MAMPU BaKTI telah berkontribusi melahirkan Perdes, masing-masing di Ambon, Lombok Timur, dan Belu. Perdes tersebut didorong oleh Kelompok Konstituen (KK) yang merupakan organisasi sosial di tingkat desa/kelurahan yang mengorganisasi dan memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan sosial pemerintah.

Sejak 2015 hingga pertengahan 2018 Program MAMPU-BaKTI telah berkontribusi melahirkan beberapa kebijakan, yang terdiri dari Perda (17), Perbub/Perwali (16), Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Dinas (11), Nota Kesepahaman (3), dan Perdes (2).

PERATURAN DAERAH

1. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
2. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
 13. Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Keluarga Miskin.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 15. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 8 Tahun 2017 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 8 Tahun 2017 Tentang Kabupaten Layak Anak.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
 3. Peraturan Walikota Kendari No. 55 Tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Kendari.
 4. Peraturan Bupati Bone No. 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 8 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
 5. Peraturan Walikota Ambon No. 8 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
 6. Peraturan Walikota Parepare No. 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Berperspektif Gender Kota Parepare.
 7. Peraturan Bupati Maros No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.
 8. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 37 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal dalam Kurikulum Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
 9. Peraturan Walikota Parepare No. 40 Tahun 2017 tentang Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 10. Peraturan Bupati Maros No.1737/kpts/266/IX/ 2017 tentang Pembentukan Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
 11. Peraturan Bupati Maros No. 1727/Kpts/IX/ 2017 tentang Pembentukan Tim Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
 12. Peraturan Bupati Maros No. 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
 13. Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
 14. Peraturan Bupati Maros No. 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.
 15. Peraturan Walikota Ambon No. 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

1. Peraturan Bupati Belu No. 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Belu.
2. Peraturan Bupati Maros No. 63 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Balita, dan Anak.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maros.

16. Peraturan Bupati Tana Toraja No...Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tana Toraja.

SURAT KEPUTUSAN

1. Surat Keputusan Walikota Ambon No. Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas P3AMD.
2. Surat Keputusan Walikota Ambon No. Tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ambon.
3. Surat Keputusan Walikota Kendari No. 1346 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Kendari Periode 2018-2022.
4. Surat Keputusan Bupati Belu No. DP3A.58/162/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AKB No. 476/624.a/DP3AKB Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja No. Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja No. Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja.
8. Surat Keputusan Bupati Belu No. 58 Tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Belu.
9. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No. 13/V/2017 tentang Pengurus Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tana Toraja.

10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur No. 476/424.a/DP3AKB/2017 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah DP3AKB Kabupaten Lombok Timur.
11. Surat Keputusan Walikota Parepare No. 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelompok Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

NOTA KESEPAHAMAN/MOU

1. Nota Kesepahaman antara mitra daerah dengan dan DPRD (3 Nota Kesepahaman Tahun 2014 dan 4 Nota Kesepahaman Tahun 2015).
2. Nota Kesepahaman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari dengan Aparat Penegak Hukum Kota Kendari.
3. Nota Kesepahaman Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan (SPPT-PPKT) Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Perjanjian Kerjasama antara Rumpun Perempuan Sultra (RPS) dengan Kepolisian Resort Kendari tentang Program Rumah Rehabilitasi.

PERATURAN DESA

1. Peraturan Desa Kembang Kerang No. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peraturan Desa Naekasa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Keputusan Kepala Desa untuk Pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) tahun 2018 di Kabupaten Belu: Desa Naekasa, Mandeu, Lakanmau, Lasiolat, Dualasi, Jenilu, Dualaus, Kenebibi, Fatuketi, Leun Tolu, Naitimu, Dualasi Raiulun, dan Fatulota.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Sumarni Arianto / Yayasan BaKTI

MELAYANI Mengunjungi Belu, Serambi Indonesia

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

*Husar dato rai bot
Bidan dato rai bot
Sasekin dato hira-hira
Tanen dato hira-hira
Ha kau hota dei
Ha man hola dei....*

(Sajak selamat datang yang bermakna rasa syukur dan terimakasih telah dikunjungi demi perubahan baik bagi masyarakat)

Lantunan sajak selamat datang dibawakan oleh tiga orang anak dengan balutan kain tenun khas Belu berwarna cerah di depan gerbang SD Negeri Tini. Rombongan tamu yang dipimpin Wakil Bupati Belu menyimak takzim lantunan sajak hingga selesai. Bukan hanya sajak, rombongan juga disuguhi dengan tarian dan lantunan lagu dari sekitar 12 anak perempuan dan laki-laki juga dengan balutan kain khas Belu.

SDN Tini yang berlokasi di Jl. Loro Lamaknen Tini Kec. Atambua Selatan adalah salah satu lokasi yang dikunjungi oleh peserta tukar pengalaman pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Sebelumnya, kegiatan kunjungan diawali dengan penerimaan secara resmi oleh Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan di ruang pertemuan kantor Bupati Belu. Hadir dalam pembukaan tersebut adalah perwakilan dari Pemerintah Daerah Bojonegoro, Perwakilan dari World

Bank serta Yayasan BaKTI. Dalam sambutannya, World Bank yang diwakili oleh Bapak Ahmad Zaki menyatakan bahwa permasalahan layanan dasar yang sifatnya sederhana di Indonesia relatif sudah mulai teratasi. Masalahnya adalah pada upaya mencoba menjawab tantangan yang lebih sulit. Dalam program Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia (MELAYANI), tantangan yang lebih sulit yang berusaha untuk diatasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak hanya dipecahkan dengan membangun sekolah lebih banyak tapi juga membutuhkan lebih banyak koordinasi dari semua *stakeholder* yang terkait.

Kegiatan tukar pengalaman antar pemerintah daerah dampingan program MELAYANI adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun koordinasi teknis antar pemangku kepentingan dari daerah dampingan agar pelaksanaan program lebih efektif di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pula terjadi pertukaran pengalaman antara daerah dampingan satu dengan daerah lainnya terkait pendekatan, capaian dan tantangan program. Selain itu melalui kegiatan ini dimaksudkan agar praktik-praktik baik dalam hal pendekatan yang telah diterapkan dapat teridentifikasi untuk dijadikan pembelajaran dan dipraktikkan di daerah masing-masing.

Capaian dan tantangan pelaksanaan program MELAYANI; serta terpetakannya strategi pelaksanaan program yang efektif untuk dilaksanakan pada 3 bulan terakhir program ini yakni bulan Oktober hingga Desember 2018 diidentifikasi pula melalui pertemuan yang dilaksanakan tanggal 14 September 2018 ini.

MELAYANI adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri.

Program MELAYANI yang didukung World Bank ini, sudah bekerja di tiga lokasi sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini. Ketiga lokasi tersebut adalah Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur.

Setelah Program ini bekerja selama setahun sejak Oktober 2017, tentunya terdapat perkembangan dan capaian yang telah dihasilkan. Perkembangan dan capaian ini fokus pada isu prioritas yang telah dipilih masing-masing kabupaten. Antara kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda-beda, misalnya saja di Kabupaten Kubu Raya memilih isu *Stunting*, Bojonegoro dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi dan Kabupaten Belu sendiri menetapkan kualitas pendidikan rendah sebagai isu prioritas.

Pada tahun 2017, nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SDN Tini di Kabupaten Belu berada diperingkat terendah. Olehnya, SDN Tini dipilih sebagai sekolah target analisa guna mengetahui akar permasalahan atau penyebab rendahnya nilai USBN tersebut. Dalam pemaparan kepala SDN Tini yang memiliki siswa didik sebanyak 817 dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 30 dan 4 kelas jauh ini, hal utama yang sudah dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN Tini adalah mulai dengan hal sederhana yakni perihal ketertiban guru dan siswa dimana guru diharuskan hadir di kelas sesuai jam yang telah ditentukan.

Dari hasil dampingan dan analisa permasalahan SDN Tini, diketahui bahwa hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh sekolah ada tiga yakni terkait manajemen sekolah, pembaharuan komite sekolah dan manajemen dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Selain itu, salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan adalah kepemimpinan kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah dan jajarannya bisa bermanuver atau berinovasi dalam keterbatasan yang ada.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke lokasi ke dua yakni SMPN 01 Atambua. Sekolah ini termasuk sekolah unggulan dengan banyak prestasi akademik dan ekstrakurikuler. Berlokasi di tengah kota Atambua, sekolah ini mendidik 1.632 siswa dengan jumlah guru 92 orang (42 PNS dan 50 non PNS).

Hal menarik yang ditemui di sekolah ini adalah adanya sinergi, kerjasama kemitraan yang baik antara pihak sekolah dan komite sekolah. Seperti diketahui bahwa hasil analisa tim MELAYANI Belu menunjukkan bahwa salah satu kunci peningkatan mutu pendidikan yakni ada

pada kemitraan dan partisipasi aktif komite sekolah.

Di SMPN 01, Komite sekolah bekerja independen dengan tetap selalu berkordinasi dengan pihak sekolah sebagai mitra. Komite sekolah mengelola anggaran yang hampir sama jumlahnya dengan dana sekolah sendiri. Dana ini diperoleh dari sumbangan komite sebesar 35 ribu rupiah per siswa tiap bulannya. Hal-hal yang terkait pendidikan dan pengembangan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar namun tidak dianggarkan dari dana operasional sekolah bisa diajukan untuk dibiayai oleh komite sekolah. Salah satu hal yang membanggakan adalah komite berkontribusi dalam membiayai tenaga guru yang tidak dianggarkan dalam dana BOS. Bahkan untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitasnya, laporan keuangan komite disandingkan dengan laporan keuangan dana Bos dicetak besar dalam bentuk baliho dan dipasang di dinding sekolah untuk dilihat semua pihak.

Setelah mengunjungi dua sekolah, peserta tukar pengalaman program MELAYANI kemudian melanjutkan diskusi di kantor Bappeda Belu. Dalam diskusi ini masing-masing kabupaten mempresentasikan capaian dan tantangan yang dihadapi selama program berjalan hampir setahun ini.

Untuk Belu, beberapa capaian yang telah dihasilkan adalah berupa adanya Instrumen untuk proses kajian, Surat Keputusan Bupati untuk tim kajian Dinas pendidikan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Seleksi Kepala Sekolah masuk dalam RPJMD Perubahan yang memuat tentang sosialisasi proses perekrutan, fasilitasi penilaian potensi kepemimpinan, *Leadership Training*. Selain itu capaian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya inisiatif dari sekolah untuk mulai melakukan proses perbaikan sistem layanan di tingkat satuan pendidikan.

Kabupaten Bojonegoro yang memfokuskan pada isu angka kematian ibu melaporkan beberapa capaian seperti telah terbentuknya tim kecil *problem solving*, adanya koordinasi di lingkungan sektor Kesehatan (Dinkes, Puskesmas,



Rumah Sakit, Bidan, Dokter dan Spesialis). Selain itu proses identifikasi masalah telah dilakukan bersama antara Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, bidan dan *stakeholder* lainnya. Pengumpulan dan analisa data melalui pencatatan dan pelaporan juga berjalan berkelanjutan seperti halnya penentuan prioritas masalah disusun secara bersama antar tim yang melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda, perwakilan Ikatan Bidan Indonesia, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Hal yang paling membanggakan juga dari Bojonegoro adalah budaya *problem solving* sudah mulai terinternalisasi dalam tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini ditandai dengan sedang berjalannya proses pembentukan Tim *Problem Solving* Kabupaten untuk implementasi rencana solusi terkait angka kematian ibu. Budaya *problem solving* yang dimaksud di sini adalah kebiasaan baik untuk selalu berdiskusi membicarakan isu prioritas, mengidentifikasi dan menganalisa akar permasalahan kemudian menentukan jalan keluar yang paling mungkin untuk dikerjakan lebih dulu.

Untuk Kubu Raya beberapa capaian yang dapat dilaporkan adalah Dinas Kesehatan telah melaksanakan survei Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 9 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya pada akhir tahun 2017, Terbentuknya Tim *Ad Hoc* Perumusan Masalah *Stunting* Kubu Raya Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati dan terkait data telah dilakukan koleksi *data coverage stunting* dengan melibatkan beberapa OPD.

Dalam diskusi yang siang itu difasilitasi oleh Bapak Ahmad Zaki dan *Coach* Kubu Raya bapak



Foto: Sumarni Arianto/Yayasan BaKTI

Afrizal diketahui dari para peserta bahwa salah satu nilai tambah MELAYANI adalah kemampuan untuk sama-sama memotret masalah yang sedang dihadapi secara utuh untuk kemudian sama-sama dicarikan solusinya. Apa yang dilakukan program ini adalah memfasilitasi agar ide-ide keluar, dengan tentunya berbagi pengetahuan melalui pendampingan dari program MELAYANI dan kisah sukses dari wilayah lain. Tim juga mulai menyadari bahwa solusi dari permasalahan yang dihadapi bukan dimana-mana tapi ada dan bisa dimunculkan dari pelaku sendiri.

Budaya diskusi, berdialog penting untuk dikembangkan agar solusi dan titik temu diperoleh, hal inilah yang difasilitasi oleh MELAYANI. Jika secara kolektif memikirkan masalah yang ada akan banyak ide solusi yang bisa dihasilkan. Program MELAYANI hanya bisa memberi pandangan dari luar tapi yang paling mengerti permasalahan dan solusi yang terbaik adalah pelakunya sendiri.

“Saat ini tim Belu sudah luar biasa karena sudah bisa melakukan penggalian informasi terkait masalah, proses dilakukan dengan cukup sederhana namun data yang diperoleh akurat, tim juga sudah mampu menganalisa dan menemukan solusinya” ungkap ibu Karrie Mclaughlin mentor World Bank.

Menurut tim Bojonegoro yang diwakili oleh dr. Ahmad Hernowo, Kepala Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Bojonegoro, proses kerja Program MELAYANI sangat menarik, mulai proses advokasi ke tingkat pengambil keputusan, turun lapangan mencari akar permasalahan dan

merumuskan solusinya. Ia berharap kedepannya pendekatan MELAYANI ini bisa juga diterapkan untuk isu prioritas lainnya misalnya pengentasan kemiskinan.

Diskusi berjalan seru, peserta seakan berlomba mengutarakan pendapat dan masukan masing-masing terkait proses pelaksanaan MELAYANI yang sedang berjalan di masing-masing kabupaten.

“Kami sudah mengetahui masalah dan solusi yang harus

kami ambil, tapi kami tetap membutuhkan bantuan dari WB (World Bank) untuk mengadvokasi ke tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi misalnya ke BAPPEDA atau Bupati” ungkap Bapak Gaspar salah satu pengawas sekolah yang tergabung dalam tim MELAYANI Belu.

Terkait upaya replikasi dan diseminasi pendekatan MELAYANI ke banyak wilayah di Indonesia juga sempat dibahas dalam diskusi ini. Namun, dibutuhkan bantuan pihak ke tiga untuk memfasilitasi atau menjembatani, seperti fungsi-fungsi yang dilakukan program MELAYANI selama ini misalnya Bappeda, Pemerintah Provinsi atau mungkin akademisi.

Salah satu masukan menarik terkait pihak ketiga tersebut diungkapkan peserta dari Pemberdayaan Perempuan Belu, menurutnya Bappeda menjadi ujung tombak untuk membuat kajian dan mendiskusikan hasil kajian seperti proses yang sudah dilaksanakan tim MELAYANI selama ini.

MELAYANI masih akan mendampingi pemerintah kabupaten Belu, Bojonegoro dan Kubu Raya hingga Desember 2018. Proses diskusi dan kolaborasi multi pihak di masing-masing kabupaten tetap harus dilanjutkan guna menemu kenali masalah dan solusi yang tepat untuk diambil sambil mulai memikirkan pihak mana nantinya yang akan menjadi fasilitator yang menjembatani proses ini selepas program MELAYANI berakhir.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MELAYANI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Mereformasi Sekolah dan Komite Sekolah Serta Meningkatkan Tata Kelola Sekolah

Oleh **SUHARTO**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP bersama beberapa pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menghadiri kegiatan Penguatan Pengawasan dan Kepala Sekolah tanggal 24 September silam di Hotel Royal Memberamo, Sorong, Papua Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Program KOMPAK-LANDASAN II dihadiri oleh sekitar 119 peserta (82 Laki-laki, 37 Perempuan) yang berasal dari Kabupaten Sorong, Kaimana, Manokwari Selatan dan Fakfak.

Team Leader Program KOMPAK-LANDASAN II, Don K. Marut, menyampaikan bagaimana Program Peningkatan Layanan Dasar (LANDASAN) di Papua dan Papua Barat didesain oleh BAPPENAS, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama KOMPAK, dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui kerjasama bilateral antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini diimplementasikan oleh Yayasan BaKTI dan bekerja di 10 kabupaten, 26 distrik, 225 kampung, 218 sekolah dan 31 Puskesmas di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Program KOMPAK-LANDASAN II menggunakan pendekatan integrasi dan kolaborasi antara



Foto: N.J. Tangkepayung / Yayasan BaKTI

unit-unit layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan. Program melatih kampung dalam perencanaan dan penganggaran serta tata kelola pemerintahan kampung yang melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang pendidikan, Program ini mengadakan pelatihan dan pendampingan terhadap sekolah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Manajemen Berbasis Sekolah. Pelatihan Kepala Sekolah ini merupakan permintaan dari sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan beberapa kabupaten. Banyak kepala sekolah belajar otodidak untuk menjadi kepala sekolah, tetapi tidak memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan. Demikian pun pengawas sekolah, hampir tidak ada yang mendapat pelatihan dan bimbingan untuk menjadi pengawas sekolah.

Reformasi Penerimaan Siswa Baru

Saat ini anak umur 6 tahun bisa diterima di sekolah, dan ini tidak melanggar aturan Permendikbud dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Anak yang berumur 7 tahun ke atas

wajib diterima. Anak umur di bawah 5 tahun dapat diterima melalui pertimbangan dari psikolog dan pertimbangan dari dewan guru.

Semoga di tahun depan murid sudah bisa mulai mendaftar ke sekolah sejak bulan Januari atau sekolah mulai membuka pendaftaran murid baru pada bulan Januari. Hal ini akan membantu persiapan ruang kelas dan ketersediaan guru dan fasilitas pendidikan.

Kurikulum yang kerap berubah

Dalam sesi tanya jawab, Mendikbud menyampaikan bahwa Kurikulum K-13 tetap akan diberlakukan. Namun tetap perlu diingat bahwa kurikulum itu bukan produk akhir melainkan dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejalan dengan itu, Mendikbud juga berharap guru dapat berinovasi. Menurut Mendikbud, guru adalah kurikulum yang sebenarnya. Kurikulum yang ditulis dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah rambu-rambu untuk memberi arah kepada guru. Dalam praktiknya gurulah yang memiliki otoritas dalam memilih arah. Singkatnya, guru dapat memilih arah yang ditentukan oleh rambu-rambu di dalam kurikulum yang dibuat oleh kementerian.

Menanggapi permasalahan yang sering dihadapi seperti guru kurang mampu membuat soal ujian dan guru yang sudah tunduk pada agen bimbingan belajar, Mendikbud berpesan, "Guru harus dapat menjadi lebih mandiri. Otoritas membuat soal tentu saja ada pada guru".

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang beban kerja guru, Mendikbud mengungkapkan bahwa "Beban kerja guru adalah 24 jam tatap muka. Bila ini tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan tunjangan profesi. Sekarang beban mengajar paling banyak terpenuhi 18 jam, sehingga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 kegiatan dapat diganti dengan kegiatan lain, misalnya membimbing siswa maupun memimpin organisasi ekstrakurikuler".

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KOMPAK-LANDASAN II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

“

Lahirnya *Kucata'ki* menjadi sebuah kebanggaan. Dengan adanya aplikasi ini, ini menambah profesionalisme rumah sakit dan Puskesmas karena ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil langsung bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Puskesmas maka inilah yang menambah *public service* yang ada. Apalagi akta kelahiran menjadi sangat serius karena kita sudah menganut sistem *single identity*.

”

Danny Pomanto,
Wali Kota Makassar



Kucata'Ki

Inovasi Layanan
Pencatatan
Kelahiran Online
di Rumah Sakit
dan Puskesmas

Oleh **Hamsah Siring**

Kehadiran program *Kucata'Ki* bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang baru lahir agar segera mendapatkan pengakuan secara hukum tentang identitas dan hak sipilnya sejak dini secara *online*. Strategi mencatat setiap anak yang baru lahir, Dukcapil bermitra dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit (RS), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), rumah bersalin, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk mencatatkan dan melaporkan kelahiran anak yang baru lahir secara cepat dan akurat agar mereka segera mendapatkan akta kelahirannya. Demikian penjelasan Ibu Nielma



Foto: Hamsah Siring/Yayasan BaKTI

Palamba, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar.

Program *Kucata'Ki* dirancang berbasis *website* dan gawai android oleh tim IT Dinas Dukcapil Makassar. Jika menggunakannya dengan gawai android, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi *Kucata'Ki* di *Play Store*. *Kucata'Ki*, bahasa Makassar, yang berarti Kami Mencatat. Maksudnya dimaksudkan untuk mencatat kelahiran semua anak warga Kota Makassar.

Program aplikasi pencatatan atau pelaporan kelahiran secara *online Kucata'Ki* ini juga mengisi konsepsi *Makassar Sombere* dan *Smart City*. Ini sebuah hal yang luar biasa, membuat warga kota menjadi lebih cerdas. Ini upaya mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia, dimana pemerintah kota terus melayani

masyarakatnya jauh lebih mudah, lebih singkat, dan lebih cepat melalui teknologi. Demikian Danny Pomanto menguraikan saat meresmikan penggunaan program *Kucata'Ki* di Best Western Hotel Makassar Agustus lalu.

Sejak program *Kucata'Ki* dioperasikan oleh 27 RS, RSIA, dan Puskesmas mitra, atas dasar Perjanjian Kerja Sama Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan, laju peningkatan cakupan Akta Kelahiran semakin cepat. Saat ini, sesuai data Dukcapil per Oktober 2018 cakupan Akte Kelahiran mencapai 90.02%, capaian itu telah melampaui target RPJMN 90% tahun 2014-2019.

Menurut Nielma Palamba, terobosan pencatatan kelahiran seperti program *Kucata'Ki* bersama pusat-pusat layanan kesehatan dan inovasi yang terbaru adalah penerbitan Akta



Foto: Hamsah Siring/Yayasan BaKTI

Kelahiran menggunakan huruf braille untuk anak dengan disabilitas sangat membantu Makassar hingga memperoleh penghargaan Kota Layak Anak untuk kesekian kalinya. Saat ini melalui program *Kucata'Ki*, anak akan dengan mudah mendapatkan tiga layanan sekaligus yakni Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga.

Membekali Penanggung Jawab

Secara teknis, aplikasi ini membuat skema baru dari proses pencatatan kelahiran di atas meja di kantor Dinas Dukcapil menjadi pencatatan secara daring. Kehadiran aplikasi ini memotong jalur birokrasi sehingga efisien karena warga tidak perlu datang berkali-kali dan antri di kantor Dinas Dukcapil. Cukup sekali datang yakni pada saat pengambilan Akta Kelahiran, juga tidak perlu antri karena pendaftar *online* disediakan jalur khusus. Bahkan, pendaftar *online* bisa tidak datang karena petugas Dukcapil dapat mengantarkan Akta Kelahiran jika sejumlah Akta Kelahiran yang didaftarkan *online* secara kolektif oleh petugas *Kucata'Ki* di rumah sakit dan Puskesmas.

Namun, sebelum pelaporan kelahiran *online* untuk anak yang baru lahir dilaksanakan, Dinas Dukcapil terlebih dahulu membekali staf RS, RSIA, dan Puskesmas, pemahaman tentang

regulasi dan keterampilan pencatatan kelahiran melalui pelatihan. “Pelatihan pencatatan kelahiran secara *online* sangat penting karena aplikasi *Kucata'Ki* dirancang sesuai dengan aturan undang-undang. Di dalam aplikasi disediakan formulir yang harus diisi oleh pendaftar *online* sesuai syarat pencatatan sipil dan administrasi kependudukan.” kata Chaidir Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Dukcapil Makassar.

Hingga saat ini segenap 10 Puskesmas Perawatan yang ada di Makassar, ditambah dengan 11 Rumah Sakit Ibu dan Anak serta 6 Rumah Sakit Daerah dan swasta telah berpartisipasi pada pelatihan pencatatan kelahiran secara *online* yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Makassar. Selama dua hari pelatihan mereka praktik bekerja secara riil menginput dan meng-*upload* dokumen digital ke situs <http://www.dukcapil-makassar.id> dan staf yang telah dilatih secara resmi menjadi *focal point* layanan *Kucata'Ki* di tempat kerja masing-masing.

Pencatatan atau Pelaporan Kelahiran Online

Mekanisme pencatatan atau pelaporan kelahiran online dibuat lebih sederhana sehingga memudahkan bagi petugas di RS/RSIA/



Foto: Hamsah Siring/Vayasan BaKTI

Puskesmas. Untuk *log in* mereka menggunakan *username* dan *password* masing-masing yang telah dibuatkan oleh Dukcapil. Namun sebelum *log in* mereka menyiapkan data kelahiran anak dan beberapa dokumen syarat Akta Kelahiran yakni, Surat Kelahiran Asli, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Buku/ Akta Nikah, dan fotokopi KTP ayah dan ibu.

Selanjutnya petugas Kucata'Ki melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Digitalisasi dokumen dengan memindai atau memfoto semua dokumen yang disebutkan di atas.
2. *Log in* Kucata'Ki dan melakukan registrasi. Pada proses ini Dukcapil langsung menjawab dengan memberikan nomor registrasi *online*.
3. Proses registrasi terus berlanjut dengan mengisi *form* pencatatan kelahiran yang sudah tersedia. Jika pengisian *form* sudah lengkap, selanjutnya melampirkan file dokumen syarat Akta Kelahiran tersebut, dan kemudian mengirimkan atau *submit* ke Dukcapil.
4. Petugas di Dukcapil langsung bekerja melakukan verifikasi data dan dokumen yang diterima dan selanjutnya mengirimkan notifikasi status dokumen, dinyatakan lengkap dan bila tidak lengkap akan ditolak.
5. Jika dokumen lengkap, Dukcapil langsung mengirimkan ke pelapor/petugas Kucata'Ki di RS/RSI/Puskesmas tanggal pengambilan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA) di kantor Dukcapil.
6. Pengambilan Akta Kelahiran oleh pihak RS/RSIA/Puskesmas atau pemilik akta dengan membawa dokumen asli yang telah discan atau difoto saat sebelum pelaporan *online*. Akan tetapi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dapat diantarkan ke RS/RSIA/Puskesmas oleh petugas Dukcapil jika sejumlah Akta Kelahiran adalah hasil pelaporan kolektif.

Kehadiran aplikasi Kucata'Ki di RS/RSIA dan Puskesmas telah dirasakan manfaatnya oleh banyak warga Makassar. Seperti Ibu Rasni Basri, warga Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, yang telah melahirkan di Rumah Sakit Bhayangkara, "Pelayanan ini betul-betul sangat memuaskan karena memudahkan orang, tidak rumit, dan cepat. Bahkan sangat efisien karena satu kali pelaporan di rumah sakit langsung dapat tiga yakni Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak."katanya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KUCATA'KI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



BaKTI Melatih, BaKTI Mendampingi

Oleh **DESY MUTIALIM**

“Harus bekerja pakai hati.” Ini jawaban dari seorang tokoh agama di Agats, Asmat, ketika ditanya seorang pejabat pemerintah pusat: ‘Apa tips untuk memajukan pembangunan di Papua?’

Bekerja pakai hati maksudnya adalah sungguh-sungguh memberikan hati untuk mendampingi masyarakat, bekerja dan berkembang bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya datang sebentar, lalu pergi. Untuk dapat membangun masyarakat, perlu memahami cara pikir mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka dan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Dalam

praktiknya, tidak mudah melakukan hal ini karena butuh banyak sumber daya. Namun tetap dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih sederhana.

Pendekatan inilah yang coba dilakukan BaKTI dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua. BaKTI menempatkan asisten komunikasi untuk masing-masing kabupaten yang didampingi: Asmat, Lanny Jaya dan Paniai. Mereka menjadi penghubung utama dengan Sekber ketiga kabupaten dan dengan koordinator kabupaten di Sekber Provinsi.



Sejak awal, BaKTI percaya, pelatihan saja tidak akan cukup untuk meningkatkan kapasitas anggota Sekber. Karenanya, BaKTI juga melakukan pendampingan-pendampingan, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *mentoring* atau *coaching*.

Menyusun Modul Pelatihan Berdasarkan Kebutuhan

Dalam pelatihan, BaKTI mencoba menghadirkan isu-isu riil di lapangan agar latihan-latihan atau *role play* selama pelatihan, dapat benar-benar membantu peserta menghadapi situasi nyata di lapangan.

Isu-isu ini dikumpulkan dari hasil diskusi dengan Sekber kabupaten dan provinsi. Dengan demikian, menjelang setiap pelatihan, tim BaKTI melakukan survei lewat diskusi, wawancara, sekaligus pengamatan terhadap perkembangan kegiatan dan masalah-masalah komunikasi di lapangan. Selanjutnya, modul-modul pelatihan disusun secara khusus untuk membahas isu-isu yang ditemukan.

Dalam pelatihan, BaKTI selalu memberikan kesempatan kepada anggota sekber untuk melatih dirinya. Teori-teori disampaikan di awal dan hanya berkisar 25% dari seluruh pelaksanaan pelatihan. Dalam menyelenggara-

Kegiatan Pelatihan Komunikasi bagi anggota Sekber BANGGA Papua di Paniai dan Lanny Jaya.

Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

kan pelatihan-pelatihan, BaKTI amat menekankan latihan, latihan dan latihan. Dalam beberapa kesempatan, latihan ini dibuat dalam bentuk *role play*. Di akhir setiap latihan dan *role play*, BaKTI akan mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan. Masukan-masukan ini tentunya merujuk kembali kepada teori-teori yang sudah disampaikan sebelumnya.

Mendampingi Sekber Kabupaten

Meski demikian, BaKTI tetap memperhitungkan, ketika anggota Sekber kembali ke tempat tugasnya masing-masing, mereka mungkin menemukan tantangan-tantangan baru. Karena itulah, pelatihan bukan kegiatan akhir. Sebagai tindak lanjut, tim BaKTI datang ke kabupaten secara berkala. Bersama Sekber Kabupaten, tim BaKTI mendiskusikan tantangan-tantangan komunikasi yang muncul dan potensi solusinya. Tentu, setiap kabupaten memiliki tantangan khusus yang berbeda dengan kabupaten lainnya. Karenanya, solusi yang didiskusikan pun berbeda.



Di awal program, hasil pendampingan BaKTI kepada Sekber Kabupaten Lanny Jaya membuah-kan rekomendasi agar Sekber melibatkan pihak-pihak lain untuk melakukan sosialisasi program. Pihak-pihak tersebut adalah tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh perempuan, orang muda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tokoh agama. Rekomendasi ini muncul karena anggota Sekber pada saat itu hanya terdiri dari staf Bappeda kabupaten. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lanny Jaya (116 kampung dalam 10 distrik), maka sekber pasti membutuhkan sumber daya lain untuk melakukan sosialisasi program dan edukasi tentang pemanfaatan dana BANGGA Papua. Pelibatan pihak-pihak yang berkepenting-an ini penting untuk memastikan bahwa program BANGGA Papua dapat dilaksanakan dengan baik.

Stakeholder Engagement

Sekber juga perlu menyusun strategi tentang bagaimana memberdayakan pihak-pihak yang selama ini telah mendukung pelaksanaan program, untuk membantu merangkul semua *stakeholder*. Mungkin saja pihak-pihak ini ingin membantu tetapi belum tahu caranya. Atau mungkin mereka belum diberikan kesempatan. Sekber perlu mendiskusikan dengan mereka, misalnya, bagaimana membantu sosialisasi dan edukasi sesuai dengan peran mereka masing-masing.

BaKTI bekerja bersama Sekber kabupaten menyusun rencana kerja untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Rencana kerja disertai dengan perkiraan waktu pelaksanaan sehingga Sekber kabupaten dapat mengatur waktu dan sumber daya mereka.

Menjelang pencairan dana, BaKTI menemukan, setiap kabupaten membutuhkan bantuan menyusun panduan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teknis yang mungkin diajukan penerima manfaat. Dengan bantuan BaKTI,

Kegiatan Pelatihan Komunikasi bagi anggota Sekber BANGGA Papua di Asmat.

Foto : Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

Sekber kabupaten berusaha mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul saat pengumuman nama-nama penerima manfaat dan saat pencairan dana. Jawaban-jawaban yang bijak dan masuk akan didiskusikan bersama.

Untuk kepentingan ini juga, di awal Oktober, BaKTI memfasilitasi pelatihan komunikasi tingkat lanjut untuk Sekber kabupaten. Fokus pelatihan ini adalah mempersiapkan Sekber Kabupaten menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul menjelang pencairan dana, yang dijadwalkan bulan Desember 2018. Salah satu materi pelatihan termasuk keterampilan teknis tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dan merespon keluhan-keluhan dari masyarakat saat pengumuman nama-nama penerima manfaat dan pencairan dana.

Meningkatkan kapasitas memang bisa mudah, bisa juga kompleks. Kita dapat melakukannya sebatas pelatihan, tetapi juga bisa jauh lebih dari itu. Pendampingan memang lebih kompleks karena membutuhkan perhatian khusus, menyediakan asistensi beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten (*tailor-made*) dan menuntun sumber daya yang kuat. Namun, BaKTI telah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. BaKTI tidak akan meninggalkan Sekber Kabupaten bergelut sendirian dengan tantangan-tantangan yang ada di tiap kabupaten. Karena, bagi BaKTI, peningkatan kapasitas tidak berhenti di pelatihan. Bagi BaKTI, kerja di Papua memang harus dengan hati.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Kegiatan di BaKTI

3 Oktober 2018

Diskusi Rancangan RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Yayasan BaKTI menggelar Diskusi Rancangan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Diskusi ini bertujuan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak terhadap rancangan RPJMD Sulsel tahun 2018-2023. Diskusi dibuka oleh Kepala Balitbangda Sulsel, Dr.Muh. Iqbal Suaib. Kepala Balitbangda dalam sambutannya mengatakan bahwa visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih yakni inovatif, kompetitif, produktif, inklusif dan berkarakter merupakan awal dari draft penyusunan RPJMD 2018-2023 ini. Rancangan RPJMD ini juga memuat 5 misi, 5 tujuan, 5 sasaran, 5 strategi, 5 arah kebijakan dan 34



program prioritas. Hadir sebagai narasumber adalah A. Zulkarnaen Arief (Ketua Kadin Sulsel), Abd. Madjid Sallatu (Pengamat pembangunan daerah), A. Muh. Irfan AB (Anggota DPRD Sulsel) dan dimoderatori oleh Dr. Aggussalim (Ekonom UNHAS dan Tim penyusun naskah akademik RPJMD Sulawesi Selatan). Kegiatan ini dihadiri oleh 74 peserta berasal dari unsur Pemda, Kadin, akademisi, media dan legislatif.

12 Oktober 2018

Pelatihan pencarian keluarga dan reunifikasi bagi pekerja Sosial

Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan UNICEF bekerja sama dengan BaKTI mengadakan Pelatihan dua hari untuk pekerja sosial tentang pelacakan keluarga dan reunifikasi sebagai bagian dari tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di Palu dan daerah lain di Sulawesi Tengah. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial dalam keadaan darurat program respon. Pelatihan terdiri dari kebijakan keamanan anak, anak dalam keadaan darurat, pencarian dan reunifikasi keluarga. Dalam dua hari, para peserta diberdayakan untuk memahami tentang topik



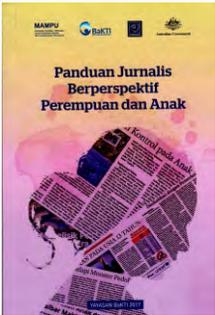
melalui serangkaian studi kasus dan permainan peran. Selain itu, mereka akan menerapkan pengumpulan data. Sebanyak 27 pekerja sosial dari berbagai daerah hadir sebagai peserta.

20 Oktober 2018

Sosialisasi Program Pertukaran ke Amerika

Bertempat di kantor BaKTI Makassar, komunitas Possible Hub dan para alumni Young South East Asian Leader Initiative Programs (YSEALI) mengadakan *sharing session youth exchange program* ke Amerika. Sebanyak 60 pemuda Makassar yang terdiri dari mahasiswa dan profesional muda hadir mendengarkan informasi mengenai program YSEALI. YSEALI merupakan program pelatihan kepemimpinan pemuda yang diinisiasi oleh mantan Presiden AS Barack Obama sejak tahun 2013. Program ini bertujuan untuk menjaring calon pemimpin muda potensial dari

negara ASEAN di masa depan, dengan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme bagi para penerima beasiswanya. YSEALI sendiri memiliki dua program utama yaitu Academic dan Professional Fellow. YSEALI Academic ditujukan bagi pemuda dari umur 18-25 tahun, untuk mengikuti kuliah singkat di Amerika Serikat. Sedangkan YSEALI Professional Fellow Program ditujukan bagi pemuda dari usia 25-35 tahun, untuk mengikuti magang singkat di berbagai institusi pemerintah maupun swasta di Amerika. Beragamnya tema YSEALI membuat program ini sangat menarik. Mulai dari tema lingkungan, ekonomi, pemberdayaan pemuda & masyarakat. Program ini juga merupakan beasiswa penuh yang membawa misi pertukaran budaya, dimana para peserta dari negara ASEAN akan tinggal dengan keluarga angkat selama program di Amerika.



Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

PENULIS Rahmat Hardiansya, Lusia Palulungan, M. Ghufuran H. Kordi K

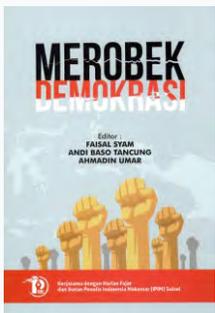
Berita tentang perempuan dan anak di media massa sering dikeluhkan, tidak hanya oleh mereka yang aktif bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun juga oleh masyarakat umum. Penulisan atau pemberitaan sering kali memberi stigma dan stereotip kepada perempuan dan anak karena penggunaan istilah yang tidak tepat, bahasa yang kurang pantas, atau pemuatan foto yang tidak pantas. Buku ini memiliki tujuan agar jurnalis dan media bisa memiliki pemahaman tentang jurnalisisme advokasi khususnya terkait perempuan dan anak.



Terjemahan Tujuan dan Target Global Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

PENULIS Prof. Dr. Emi Emilia dan Tim

Buku ini merupakan terjemahan dari dokumen "Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development". Dokumen tersebut dituliskan dalam Bahasa Inggris, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. Di dalam dokumen tersebut terdapat tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) global dimana terdapat 17 tujuan/goals dan 169 target yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi. Tujuan dan target tersebut menjadi panduan bagi masyarakat global selama 15 tahun ke depan dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan dunia.



Merobek Demokrasi

PENERBIT Faisal Syam, Andi Baso Tancung, Ahmadin Umar

Merobek Demokrasi merupakan kumpulan tulisan yang pernah dimuat di Harian Fajar dengan berbagai macam topik, mulai dari pendidikan, kesehatan, politik hingga kelautan dari berbagai latar belakang para penulis. Menamai buku ini dengan kata demokrasi bukan tanpa alasan. Sifat general demokrasi membuatnya bisa bersesuaian dan dapat masuk ke semua ranah disiplin ilmu pengetahuan, persis seperti isi dari buku ini.



Profesor

PENULIS Faisal Tehrani

Buku ini mengangkat tema hak asasi manusia, bercerita tentang seorang profesor feminis yang banyak menulis mengenai hak lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam masyarakat Melayu. Faisal Tehrani merupakan penulis asal Malaysia yang karyanya telah tersiar sejak dia berusia 17 tahun.